

EDITORIAL

J.S. Furnivall, seorang administrator dan penulis politik Inggris, memperkenalkan para pembaca Barat dengan dengan gagasan tentang masyarakat majemuk (*plural society*), serta mengidentifikasi negara-negara yang sekarang kita sebut Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai contoh yang paling menonjol. Bagi Furnivall (Hefner, 2007:16; Nasikun, 2007:33) "*a plural society is a society that comprises 'two or more elements or social orders which live side by side, yet without mingling, in one political unit'*" atau masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur, dalam satu unit politik.

Tujuan yang hendak dicapai dari masyarakat majemuk itu adalah terwujudnya masyarakat yang dialogis, toleran, dan dinamis. Kendatipun demikian, masyarakat majemuk yang berbasis pada pluralisme tidak menyentuh domain kelompok etnis, adat, dan kelompok minoritas lainnya. Pluralisme lebih merujuk kepada hadirnya sejumlah kebudayaan yang masing-masing identitas, ciri-ciri, dan sifat sendiri. Oleh karena setiap kebudayaan adalah otonom, maka unsur pengikat keanekaragaman kebudayaan adalah kebijakan pemerintah (negara). Dalam konsep pluralisme, inisiatif integrasi berada di tangan pemerintah yang membangun arena-arena dimana orang-orang yang berasal dari berbagai kebudayaan itu berinteraksi.

Sebagaimana dengan orang-orang Cina, India, dan Melayu di British Malaya, kombinasi kedekatan geografis dengan segregasi sosial, menurut Furnivall dibarengi dengan suatu pembagian tenaga kerja yang mirip kasta, dimana kelompok-kelompok etnoreligius memainkan peran-peran ekonomi yang berlainan. Segregasi sosial ini pada gilirannya memunculkan tidak adanya "kehendak sosial umum" (*common social will*). (Hefner, 2007:16).

Di sini multikulturalisme hadir sebagai alternatif untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas etnis dan adat. Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat

mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Blum, 2001:16).

Kata kunci dalam multikulturalisme adalah pengakuan adanya perbedaan dan penghargaan. Karena itu dalam pendekatan multikulturalisme tidak sesungguhnya berlandaskan pada pemilikan yang mengisyaratkan pada memiliki atau dimiliki budaya tertentu, tetapi berlandaskan pada kesadaran untuk menghargai dan menghormati yang mampu bernegosiasi tentang rumusan-rumusan realitas yang ada. Dalam multikulturalisme, setiap orang tidak hanya dituntut untuk respek terhadap diferensiasi, tetapi meyakini bahwa diferensiasi tersebut diperlukan untuk pembentukan masyarakat yang sehat. Hasil yang diharapkan adalah sikap dan perilaku toleran, saling menghargai, dan kerukunan antar kebudayaan.

Pengembangan pemahaman multikulturalisme tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan Azra (2006:153). Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan multikultural (*multicultural education*), sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (Tilaar, 2004:181). Pendidikan multikultural ini diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap.

Sekaitan dengan hal di atas, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam upaya pengembangan masyarakat multikultural. Pendidikan kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan yang berperan penting dalam pendidikan multikultural mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (**Dikdik Baehaqi Arif**).